EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Nama : **Rahman Bangsawan**

NIM : **222011149**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2015

EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : Rahman Bangsawan

NIM : 222011149

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2015

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMAN BANGSAWAN

Nim : 222011149

Program studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 8 Maret 2015
Penulis

METERAI TEMPEL
TGL. 20
CA8ADF177963746
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(RAHMAN BANGSAWAN)

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Inspektorat Kota Palembang
Nama	:	Rahman Bangsawan
NIM	:	222011149
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	:	Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	:	Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal.....

Pembimbing,

Welly,S.E., M.Si,
NIDN/NBM : 0212128101/1085022

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program studi Akuntansi

Rozalina Ghazali.,SE., AK., M.Si
NIDN:0228115802/1021961

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- " Hidup adalah anugrah terindah yang diberikan oleh ALLAH SWT, jadi pergunakanlah sisa-sisa hidupmu untuk hal yang baik sebagai rasa syukur kita kepadanya "
- " Kemajuan bukanlah semata-mata perbaikan dari masa silam, kemajuan adalah bergerak maju menuju masa depan "

Dengan doa dan cinta kupersembahkan untuk

- ALLAH SWT
- Kedua Orang Tua-ku
- Kakak dan Adik-Adikku
- Teman-teman dan Sahabat sahabatKu
- AlmamaterKu

بسم الله الرحمن الرحيم

PRAKATA

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, tiada untaian kata yang paling indah yang dapat penulis ucapkan, selain dengan memuji asma Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) Pada inspektorat Kota Palembang".** Dengan penuh usaha dan doa untuk memenuhi persyatan dalam memperoleh gelar sarjana strata 1 di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama kepada kedua orang tua atas doa dan bantuannya memiliki makna besar dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Welly, SE., M.Si yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak DR. H. M Idris, SE, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Abid Djazuli, SE, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Rosalina Ghazali, SE, Ak, M.Si dan Ibu Welly SE, M.Si selaku Ketua Program dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Rosalina Ghazali, SE, Ak, M.Si selaku Pembimbing Akademik saya.
5. Kepada Inspektorat Kota Palembang beserta staf-staf tempat penulis melakukan penelitian.
6. Kepada keluarga besar saya Ibu saya tercinta Rohmania dan Ayahanda Amiruddin serta Saudara kandung saya Ari Anggraini, Amd dan Samsul Yahya yang selalu memotivasi saya.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Anggun Cahya Saputra, Adreansyah, M.Trian syaputra, Julius Saputra, Fidia Agustina, Rozalina, Venny Riska Ayunda, Indah Permata Sari, Ervi Susanti, Dwiana Nurhakim, Anik Rahmawati, Yuyun Vidia dan kawan-kawan yang selalu memberiku semangat.
8. Dan orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi laporan ini masih jauh dari sempurna.

Meskipun demikian mudah-mudahan dari laporan penelitian ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 8 Maret 2015
Penulis

(Rahman Bangsawan)

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH vi
HALAMAN DAFTAR ISI ix
HALAMAN DAFTAR TABEL xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR xiii
HALAMAN LAMPIRAN xiv
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya 8
B. Landasan Teori 11
1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 11
2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 12

3. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 13

4. Tanggung Jawab Pelaksanaan SPIP 27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 29

B. Lokasi Penelitian 30

C. Operasionalisasi Variabel 30

D. Populasi dan Sampel 31

E. Data yang Diperlukan 31

F. Metode Pengumpulan Data 32

G. Analisis Data dan teknik Analisis 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASSAN

A. Hasil Penelitian 35

1. Sejarah Singkat Inspektorat Kota Palembang 35

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 38

3. Visi dan Misi Inspektorat Kota Palembang 50

4. Data Inspektorat Kota Palembang 50

B. Pembahasan Hasil Penelitian 58

1. Gambaran Karakteristik Responden 59

2. Pembahasan Jawaban Responden 61

a. Analisis Lingkungan Pengendalian 62

b. Analisis Penilaian Resiko 71

c. Analisis Kegiatan Pengendalian 75

d. Analisis Informasi dan Komunikasai 83

e. Analisis Pemantauan Pengendalian Intern 87

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 92

B. Saran-saran 93

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Tabel Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya 10

Tabel III.1 Tabel Operasionalisasi Veriabel..... 30

Tabel IV.1 Tabel Jawaban Responden 51

Tabel IV.2 Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 59

Tabel IV.3 Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 59

Tabel IV.4 Tabel Karakteristik Responden berdasarkan Usia 60

Tabel IV.5 Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Posisi Jabatan..... 60

Tabel IV.6 Tabel Jawaban Responden Tentang Indikator Lingkungan Pengendalian 67

Tabel IV.7 Tabel Jawaban Responden Tentang Indikator Penilaian Resiko 73

Tabel IV.8 Tabel Jawaban Responden Tentang Indikator Kegiatan Pengendalian 79

Tabel IV.9 Tabel Jawaban Responden Tentang Indikator Informasi dan Komunikasi..... 84

Tabel IV.10 Tabel Jawaban Responden Tentang Indikator Pemantauan Pengendalian Intern 88

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Gambar Struktur Organisasi 39

HALAMAN LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Kuesioner

Lampiran 2 : Surat Selesai Riset

Lampiran 3 : Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Jadwal Kegiatan Penelitian

Lampiran 5 : Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an

Lampiran 6 : Surat Keterangan Toefl

Lampiran 7 : Sertifikat KKN

Lampiran 8 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Rahman Bangsawan/ 222011149/ 2015/ Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Inspektorat Kota Palembang/ Akuntansi Sektor Publik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Kota Palembang. Tujuannya adalah untuk menilai sampai sejauh mana Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Kota Palembang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, tempat penelitian pada Inspektorat Kota Palembang, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, analisis data yaitu kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan pada bab IV mengenai penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Kota Palembang. Bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada inspektorat kota palembang telah berjalan dengan baik. Karena pada Inspektorat Kota Palembang, kelima indikator tersebut telah dijalankan dengan baik dan telah sesuai dengan fungsi dari kelima indikator tersebut.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

ABSTRACT

Rahman Bangsawan/ 222011149/ 2015/ Evaluation of the Implementation of internal Government Control System (SPIP) In the Inspectorate of Palembang city/ Public Sector Accounting.

Formulation of the problem in this research is how the internal Governmen Control System Implementation (SPIP) in the Inspectorate of Palembang city. To measurethe implementation of internal government control system (SPIP) in the Inspectorate of Palembang City

This research is a descriptive study, a study on the Inspectorate of Palembang city, the data used are primary data and secondary data, technique in collecting the data by using interview, questionnaires, and documentation, data analysis used is qualitative.

Based on the analysis described in chapter IV of the implementation of the internal government control system (SPIP) in the Inspectorate of Palembang city,that the implementation of Internal Government Control System (SPIP) has been applied well. Because the Inspectorate of Palembang city, five indicators was satisfactory and in accordance with the functions of the five indicators.

Keywords: Government Internal Control System (SPIP).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel menjadi tuntutan masyarakat saat ini dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Pemerintah pusat yang diwakili oleh pemerintah daerah dari masing-masing daerah harus mencanangkan peningkatan Pelayanan Birokrasi kepada masyarakat dengan arahan kebijakan dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa *(Good Governance)*.

Pemerintah telah mengeluarkan 3 perundang-undangan dibidang keuangan Negara dalam rangka upaya mereformasi dibidang keuangan, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Dengan adanya tiga paket Undang-undang tersebut telah memberikan implikasi pengelolaan keuangan Negara yang terdesentralisasi yang diwujudkan dalam suatu sistem yang transparan, akuntabel dan terukur.

Sistem pengendalian intern yang dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan instansi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wakhyudi, 2010). Dapat dilihat

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, pasal 58 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Negara. Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menjalankan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Terbitnya PP nomor 60 Tahun 2008 tersebut selain sebagai amanah dari reformasi di bidang keuangan Negara juga ditujukan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah sebagaimana telah dijelaskan diatas. Dengan membangun SPIP secara berkelanjutan pada akhirnya ditujukan untuk menciptakan pelaporan keuangan pemerintah yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan, serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi *(clean goverment)*, merupakan akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governace)*.

Pencapaian atas pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 yang mengatur mengenai pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut telah jelas disebut dalam pasal 2 ayat (1) PP nomor 60 tahun 2008 Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Lebih lanjut dalam pasal 2 ayat (2)

juga disebutkan bahwa : pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah ini. Seperti yang telah diuraikan, SPIP merupakan suatu kewajiban bagi Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mencapai Sistem Birokrasi yang memadai dalam rangka menjalankan sistem kepemerintahan yang baik. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini terdiri dari 5 unsur yaitu: Lingkungan Pengendalian, Pengendalian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Intern.

Pertama, Lingkungan pengendalian merupakan elemen terpenting yang melandasi unsur-unsur lainnya dalam sistem pengendalian. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran, dan kompetensi. Sebaik apapun sistem pengendalian yang dibangun jika orang-orang yang melaksanakan pengendalian tersebut tidak baik maka akan rusak sistem yang dibangun, sebaliknya meskipun sistemnya belum sempurna tetapi jika dijalankan oleh orang-orang yang baik maka akan mampu membawa kebaikan. Karena organisasi tidak dapat menjamin bahwa semua orang baik atau orang yang baik akan selalu baik, maka diperlukan unsur pengendalian lainnya. Kedua, penilaian resiko dalam pengendalian intern harus memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

Ketiga, kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Keempat, informasi dan komunikasi adalah manajemen dan karyawan dapat memperoleh informasi dan dapat berkomunikasi dengan atasan dan atau rekan kerjanya yang memungkinkan mereka memahami tugas dan tanggung jawab pengendalian secara baik. informasi dan komunikasi juga digunakan untuk memastikan bahwa dalam organisasi terdapa alur informasi yang jelas dan mudah antara pimpinan dengan bawahan, dari bawahan ke atasan, atau antara karyawan. Kelima, pemantauan (*monitoring*) harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindak lanjuti.

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Oleh karenanya, para pemimpin/pejabat instansi Pemerintah (SKPD) wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam rangka untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Inspektorat kota Palembang yang beralamat di jalan Kapuran No. 3 Kelurahan 22 Ilir Palembang adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada walikota sehingga dituntut untuk

menjalankan SPIP dengan baik yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008, sudah sejak tahun 2010 Inspektorat Kota Palembang telah menerapkan SPIP ini, dalam satu bulan Inspektorat Kota Palembang melakukan dua kali SPIP yang dilakukan oleh beberapa tim dalam satu tim berisi lima orang.

Dalam menerapkan atau menjalankan sistem pengendalian intern pemerintah ini masih menemui kendala seperti sering bergantinya pimpinan yang menjadikannya sulit untuk membangun komitmen pimpinan itu sendiri sehingga sistem tidak berjalan secara berkelanjutan, yang seharusnya sistem itu dibuat secara berkelanjutan. Kendala kedua adalah pada bidang Sumber Daya Manusianya dimana karyawan masih ada yang kurang paham terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah PP No. 60 Tahun 2008, keterbatasan kompetensi ini juga sehingga menyulitkan karyawan untuk mengerti atau memahami SPIP tersebut. Sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman sesuai dengan bidangnya, sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu memahami tujuan organisasi dengan baik. Kemampuan sumber daya manusia sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (andal), sehingga apabila sumber daya manusianya baik akan menghasilkan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik pula.

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Redi Erwansyah (2012) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat menunjukkan bahwa

penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di pemerintah daerah kabupaten lahat secara umum telah dilaksanakan dengan cukup efektif, meskipun belum benar-benar efektif karena masih terdapat beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian instansi pemerintah.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Nuning Hindriani (2012) dengan judul sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di daerah (studi pada dinas kesehatan kabupaten Madiun) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam pengawasaan preventif dijadikan sebagai pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran. Dengan demikian realisasi anggaran yang dilakukan akan lebih terarah dalam pencapaian sasaran anggaran dan peyimpangan lebih terminimalisir karena pelaksanaan anggaran telah diatur dengan prosedur pelaksanaan. Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang ada, sehingga penulis tertarik ingin mengetahui telah sejauh mana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah itu ditetapkan di Inspektorat Kota Palembang dengan judul **"Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Kota Palembang".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dirumuskan suatu permasalahan, sebagai berikut Bagaimanakah Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menilai sampai sejauh mana Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Kota Palembang terlaksana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. **Bagi Penulis**

   Untuk menambah wawasan keilmuan mengenai sistem pengenalian intern pemerintah.

2. **Bagi Inspektorat Kota Palembang**

   sebagai bahan masukan dalam membantu pemerintah kota menjalankan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dengan lebih baik.

3. **Bagi Almamater**

   Sebagai bahan masukan dan referensi yang mungkin dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya dimasa yang akan datang.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian pertama berjudul tentang Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat yang dilakukan oleh Redi Erwansyah (2012). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada pemerintah daerah kabupaten lahat?. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sampai sejauh mana penerapan sistem pengendalian intern (SPIP) pada pemerintah daerah kabupaten lahat terlaksana?. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data priemer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode Angket/kuisioner, dokumentasi, dan wawancara. Metode pemilihan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sample secara acak sederhana (simple random sampling) teknik pengambilan sample dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (sugiyono, 2002).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di pemerintah daerah kabupaten lahat secara umum telah dilaksanakan dengan cukup efektif, meskipun belum benar-benar efektif karena peneliti melihat beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian instansi pemerintah. Terdapat perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis buat ini adalah penelitian sebelumnya mengenai

evaluasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada pemerintah daerah kabupaten lahat dan penelitian yang penulis buat adalah membahas tentang evaluasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada inspektorat kota Palembang. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis tentang sistem pengendalian intern pemerintahan.

Penelitian kedua berjudul Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun) yang dilakukan oleh Nuning Hindriani (2012). Data yang diguanakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan kepustakaan, dan pengamatan lapangan dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengawasan preventif dijadikan sebagai pengendalian awal terhadap pelaksanaan anggaran. Dengan demikian realisasi anggaran yang dilakukan akan lebih terarah dalam pencapaian sasaran anggaran dan penyimpangan lebih terminimalisir karena pelaksanaan anggaran telah diatur dengan prosedur pelaksanaan.

perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis buat ini adalah penelitian sebelumnya mengenai sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di daerah dan penelitian yang penulis buat adalah membahas tentang evaluasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada inspektorat kota

Palembang. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis tentang sistem pengendalian intern pemerintahan.

Tabel II.1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat, Redi (2012)	Sama-sama menggunakan variabel yang sama yaitu SPIP	Terletak pada tempat penelitiannya. Jika Redi Erwansyah meneliti pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat sedangkan penelitian ini akan dilakukan pada Inspektorat Kota Palembang
2	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun), Nuning (2012)	Sama-sama menggunakan variabel yang sama yaitu SPIP	Terletak pada tempat penelitiannya. Jika Nuning Hindriani meneliti sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di daerah dan penelitian yang penulis buat adalah membahas tentang evaluasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada inspektorat kota Palembang.

Sumber : Penulis, 2015

B. Landasan Teori

1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dalam sektor publik, sistem pengendalian bukan hanya bertujuan untuk pengendalian dalam akuntansi keuangan saja, akan tetapi juga untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organsisasi yang efektif dan efisien sehingga tujuan organsisasi dapat dicapai, sehingga dinyatakan dalam definisi pengendalian intern dibawah ini.

Definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, selanjutnya disingkat SPIP berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organsisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dari definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di atas dapat di telaah bahwa pengendalian tersebut harus dilaksanakan secara terus-menerus atau berkesinambungan oleh pemimpin dan segenap karyawan agar hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Seperti telah disebutkan di Pasal 1 ayat (2) pada PP No.60 Tahun 2008, yakni : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah selanjutnya disingkat SPIP adalah Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari definisi Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 1 ayat (2) diatas dapat ditelaah bahwa pengendalian intern harus dilaksanakan pada seluruh instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No 60 tahun 2008)

Dari pengertian di atas dapat dijabarkan bahwa SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi :

a. Tercapainya efektivitas dan efisiensi,
b. Pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara,
c. Keandalan pelaporan keuangan,
d. Pegamanan aset Negara, dan
e. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dari tujuan SPIP di atas dapat disimpulkan bahwa dengan dijalankannya SPIP, maka akan mendukung tujuan penyelenggaraan Negara yang lebih efektif dan efisien dan keandalan laporan keuangan yang akan membantu pemerintah mengamankan aset Negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pun juga tercapai.

Mahmudi (20:252) tujuan sistem pengendalian intern pemerintah adalah untuk :

a. Melindungi asset Negara baik asset fisik maupun data.

b. Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat.

c. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal.

d. Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP).

e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi.

f. Menjammin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari tujuan SPIP diatas disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dapat melindungi asset Negara, memelihara caatatan dan dokumen serta memberikan jaminan laporan keuangan pemerintah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, serta ketaatan terhada peraturaan perundang-undangan juga tercapai.

3. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur (PP No 60 tahun 2008) :

a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan

perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

1) Penegakan integritas dan nilai etika,
2) Komitmen terhadap kompetensi,
3) Kepemimpinan yang kondusif,
4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan,
5) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat,
6) Peyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia,
7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan
8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Resiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko tersebut terdiri atas :

1) Identifikasi risiko, dan
2) Analisis risiko.

Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan :

1) Tujuan Instansi Pemerintah, dan

2) Tujuan pada tingkat kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terkait waktu. Tujuan Instansi pemerintah wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

Untuk mencapai tujuan Instansi pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan :

1) Strategi Operasional yang konsisten, dan
2) Strategi Manajemen Terintegrasi dan Rencana Penilaian Resiko.

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah,
2) Saling melengkapi, saling menjunjung, dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya,
3) Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah,
4) Mengandung unsur kriteria pengukuran,
5) Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup.

6) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

c. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian memiliki karateristik sebagai berikut:

1) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah,
2) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko,
3) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah,
4) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
5) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis, dan
6) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian terdiri atas:

1) Reviu atas kinerja Instansi Pemerntah yang bersangkutan,
2) Pembinaan sumber daya manusia,
3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi,
4) Pengendalian fisik atas aset,
5) Penetapan dan reviu atas indicator dan ukuran kinerja,
6) Pemisahan fungsi,
7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting,
8) Pencatatan yang akurat da tepat waktu atas transaksi dan kejadian,
9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya,
10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya,
11) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian serta transaksi dan kejadian penting.

Kegiatan pengendalian terdiri atas dua bentuk yaitu:

1) Pengendalian umum
   a) Pengamanan sistem informasi.
   b) Pengendalian atas akes.
   c) Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi.
   d) Pengendalian atas perangkat lunak sistem.
   e) Pemisaahan tugas.
   f) Kontinuitas pelayanan.

2) Pengendalian Aplikasi

a) Pengendalian otorisasi.

b) Pengendalia kelengkapan.

c) Pengendalian akurasi.

d) Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

d. Informasi dan Komunisasi

Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan

2) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem Pengendalain Intern. Pemantauan Sistem Pengendalain Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pemandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Mahmudi (20:253) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 terdiri atas lima unsur :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan elemen terpenting yang melandasi unsur-unsur lainnya dalam sistem pengendalian. Lingkungan pengendalian berkitan dedngan orang, moralitas, kejujuran, dan kompetensi. Sebaik apapun sistem pengendalian yang dibangun jika orang-oraang yang melaksanakan pengendalian tersebut tidadk baik maka akan rusaak sistem yang dibangun. Sebaliknya meskipun sistemnya belum sempurna tetapi jika dijalankan oleh orang-orang yang baik maka akan mampu membawa kebaikan. Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dadn mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat melalui:

1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika, sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

a) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku.

b) Memberikan keteladanan pelaksasnaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Insstansi Pemerintah.

c) Menegakkan tindaakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturaan perilaku.

d) Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern.

e) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

2) Komitmen Terhadap Kompetensi, sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

a) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah.

b) Menyusun standaar kompetensi untuk setiap tugaas dan fungsi pada masing-masing posisi dadlam Instansi Pemerintah.

c) Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya.

d) Memilih memimpin Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajemen dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.

3) Kepemimpinan yang Kondusif, sekurang-kurangnya ditujukan dengan:

a) Mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan.

b) Menerapkan manajemen berbasis kinerja.

c) Mendukung fungsi tertentu daalam penerapan SPIP.

d) Melindungi atas aaset dan informasi daari akses dan penggunaan yang tudak sah.

e) Melakukan interaksi secara iintensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah.

f) Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

4) Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

a) Menyesuaikan dedngaan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah.

b) Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah.

c) Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah.

d) Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodic terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis.

e) Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

5) Pendelegasian Tugas dan Wewenang, sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan dengan memperhatikan hal-hal sebagia berikut:

a) Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

b) Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

c) Pegawaiyang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

6) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan SDM, dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

a) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai.

b) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen.

c) Supervise periodic yang memadai terhadap pegawai.

7) Perwujudan Peran Pengawas Intrenal pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:

a) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivits pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi pemerintah.

b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

c) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

b. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dariluar maupun dari dalam. Penilaian rissiko terdiri atas:

1) Identifikasi risiko.

2) Analisis risiko.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian antara lain meliputi:

1) Reviu atas kinerja Instansi Pemerntah yang bersangkutan,
2) Pembinaan sumber daya manusia,
3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi,
4) Pengendalian fisik atas aset,
5) Penetapan dan reviu atas indicator dan ukuran kinerja,
6) Pemisahan fungsi,
7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting,
8) Pencatatan yang akurat da tepat waktu atas transaksi dan kejadian,
9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya,
10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya,
11) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian serta transaksi dan kejadian penting.

Kegiatan pengendalian terdiri atas dua bentuk, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

Pengendalian umum terdiri atas:

1) Pengamanan sistem informasai.

2) Pengendalian atsa akses.
3) Pengendalian atas pengembangan dan peerubahan perangkat lunak aplikasi.
4) Pengendalian atas perangkat lunka sistem.
5) Pemisahan tugas.
6) Kontinuitas pelayanan

Pengendalian aplikasi terdiri atas:

1) Pengendalian otorisasi.
2) Pengendalian kelengkapan.
3) Pengendalian akurasi.
4) Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi pada dasarnya merupakan pendukung dari elemen sistem pengendalian internal lainnya. Informasi dan komunikasi juga digunakan untuk memastikaan bahwa dalam organisasi terdapat alur informasi yang jelas dan mudah antara pimpinan dengan bawahan, dari bawahan ke atasan, atau antara karyawan. Informasasi haarus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

Pimpinan (manajemen) desemua level wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat serta efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan hasrus:

1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
2) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus.

e. Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu kewaktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pementauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hsil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian endiri, reviu, dan pengujian efektivits sistem pengendalian intern.

4. Tanggung jawab pelaksaanaan SPIP

Tanggung jawab pelaksaanaan sistem pengendalian internal terletak pada manajemen. Dalam organisasi pemerintahan, menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau walikota bertangghung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan massing-masing. Dalam memperkuat dan menjunjung efektivitas Sistem Pengendaalian Intern dilakukan melalui dua hal yaitu:

a. Pengewasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara.
b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pengawaasan intrn atas penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat pengawasan intern pemerintah melkukan pengawasan intern melalui:

a. Audit
b. Reviu.
c. Evaluasi.
d. Pemantauan.
e. Kegiatan pengawaasan lainnya.

Aparat pengawassan intern pemerintah (APIP) terdiri atas:

a. BPKP,
b. Inspektorat Jendral atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern,

c. Inspektoraat Propinsi atau nama lian yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern di tingkat Pemerintah Provinsi,

d. Inspektorat Kabupaten / Kota atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern di tingkat Kabupaten / Kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2013:53-55) ada tiga macam jenis penelitian yaitu :

1. Penelitian Deskriptif

   Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

   Penelitian Komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, disini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif atau Hubungan

   Penelitian asosiatif atau hubungan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kota Palembang.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah Inspektorat Kota Palembang yang beralamat di jalan Kapuran No. 3 Kelurahan 22 Ilir Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut. Tujuannya agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan varibel yang sudah didefinisikan konsepnya.

Tabel III.1

Overasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk tercapainya tujuan organisasi pemerintah melalui kegiatan yang efektif dan efisen, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	1 Lingkungan Pengendalian 2 Penilaian Resiko 3 Kegiatan Pengendalian 4 Informasi dan Komunikasi 5 Pemantauan Pengendalian intern.

Sumber : Penulis, 2014

D. Populasi

Populasi (population) yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah tim auditor yang yang berjumlah 27 orang dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2upd) yang berjumlah 5 orang, jadi dalam penelitian ini ada total 32 responden. (sumber: Inspektorat Kota Palembang, 2015)

E. Data yang Diperlukan

Nur dan Bambang (2009: 146-147), data penelitian pada dasarnya dapat dikelompok menjadi:

1. Data primer

   Data primer adalah sumber penelitian diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data sekunder

   Data sekunder adalah sumber dat penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh berupa data seperti struktur organisasi, visi dan misi instansi, data karyawan, dan data penunjang lainnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2013: 193-205), teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Interview* (Wawancara)

   Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2. *Kuisioner* (Angket)

   Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. *Observasi*

   Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. *Dokumentasi*

   Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan cara wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Dimana wawancara dilakukan langsung dengan pihak yang mengawasi SPIP tersebut pada Inspektorat Kota Palembang. Sedangkan kuisioner dengan menyebar daftar pertanyaan yang diisi oleh pihak yang mengawasi SPIP pada

Inspektorat Kota Palembang. dan dokumntasi dengan mengumpulkan berupa data-data pendukung, dan sejarah singkat Inspektorat Kota Palembang.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

Sugiyono (2013: 53-55) Menyatakan bahwa analisis data terdiri dari :

1. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013: 53-55), analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mencatat, menuturkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis data dan informasi yang ada mengenai evaluasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Kota Palembang.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis sederhana seperti :

a. *Editing*, yaitu mengurangi kesalahan dengan cara memeriksa jawaban atau tulisan yang diberikan kepada responden.
b. *Coding*, pemberian kode pada kuisioner yang bertujuan untuk mengidentifikasikan jawaban-jawaban ke dalam kategori penting.
c. *Tabulasi*, memasukkan data dari kuisioner kedalam tabel-tabel.
d. *Verifikasi*, memeriksa dan meneliti sumber-sumber kesalahan peneliti melalui kuisioner yang telah diteliti.

Untuk mengetahui indikator SPIP pada Inspektorat Kota Palembang telah berjalan dengan baik atau belum yaitu dengan menggunakan interval sebagai berikut:

a. Dikatakan sangat baik apabila mencapai 81 – 100%
b. Dikatakan baik apabila mencapai 61 – 80%
c. Dikatakan cukup baik apabila mencapai 41 – 60%
d. Dikatakan kurang baik apabila mencapai 21 – 40%
e. Dikatakan sangat tidak baik mencapai 0 – 20%

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Inspektorat Kota Palembang.

Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat II Palembang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kodya sebagai perangkat pengawasan umum secara administratif bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dalam kedudukannya selaku Kepala Wilaya Kota madya dan secara teknis bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat II Palembang di tahun 1980 dipimpin oleh seorang kepala untuk pertama kalinya dipimpin oleh Bapak Drs. A. Baragus. Kemudian pada tahun 1982 Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat II Palembang diganti oleh Bapak H. A. M Yaqub Ratu Anum, BA, Beliau menjabat selama tujuh tahun yaitu sampai tahun 1989.

Pada tahun 1989 Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat II Palembang dijabat oleh Bapak Drs. Rustam Effendi tahun 1991 terjadi lagi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam negeri tersebut kedudukan Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kotamadya adalah aparat pengawasan fungsional yang taktis operasonal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II sedangkan teknis administratif berada di bawah pembinaan Menteri Dalam Negeri.

Sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat II Palembang tetap dipimpin oleh Bapak Drs. Rustam Effendi sampai dengan tahun 1992. Kemudian ditahun 1992 jabatan Inspektur Wilayah Dati II Palembang digantikan oleh Bapak Arfan Zainuri, SH dengan masa jabatan selama kurang lebih tiga tahun yang selanjutnya ditahun 1995 Inspektur Wilayah Dati II Palembang di jabat oleh Bapak H. Husni Thamrin, SH., MH beliau menjabat selama kurang lebih enam tahun. Kepemimpinan Badan Pengawas Daerah Kota Palembang di tahun 2001 dipimpin oleh Bapak H. Toni K. Pangarbesi, SH., M.Si.

Tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya diatur dengan Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Sejalan dengan itu, Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya berubah nomenklatur menjadi Badan Pengawas Daerah yang ditetapkan dengan Perturan Daerah Kota

Palembang Nomor Tahun tentang pemnentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Sampai dengan tahun 2002 Kepala Badan Pengawas Kota Palembang dijabat oleh Drs. H. Syarifuddin Azhar., MM, yang kemudian di tahun 2003 digantikan oleh Bapak Drs. H. A. Wahid Sjukur yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Palembang. Sejalan dengan perubahan paradigma penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana dimaksud perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka berdasarkan pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak, maka nomenklatur Badan Pengawas Daerah dikembalikan lagi menjadi Inspektorat, Beliau menjabat sampai tahun 2007 yang kemudian jabatan Inspektur Kota Palembang di jabat Oleh Bapak Drs. H. M. Amir Hamzah.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut sejalan dengan perubahan organisasi perangkat daerah lainnya di Pemerintah Kota Palembang, maka Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Palembang di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis, berdasarkan Peraturan Daerah tersebut kedudukan Inspektorat Kota Palembang merupakan unsur penunjang pengawas penyelenggaraan pemerintahan

daerah, dan secara tegas dinyatakan bahwa Inspektorat Kota Palembang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Palembang dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pada tahun 2011 tanggal 12 juli 2011 jabatan Inspektur Kota Palembang dijabat oleh Bapak Drs. Toto Suparman, AK, Beliau sebelumnya sebagai pegawai Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat yang dipekerjakan di Pemerintah Kota Palembang Khusus Walikota Palembang guna lebih menaikan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.

a. Struktur Organsisasi

Struktur organisasi merupakan pedoman para anggota organsisasi untuk melakukan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah diciptakan. Dalam struktur organisasi akan terlihat tugas dan bagian serta kepada siapa seseorang harus bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Dengan demikian masing-masing kegiatan dapat diarahkan secara teratur menurut garis wewenang yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi.

Berikut ini struktur organisasi Inspektorat Kota Palembang pada gambar IV.I

Gambar IV.1.

Struktur Organisasi

Inspektorat Kota Palembang

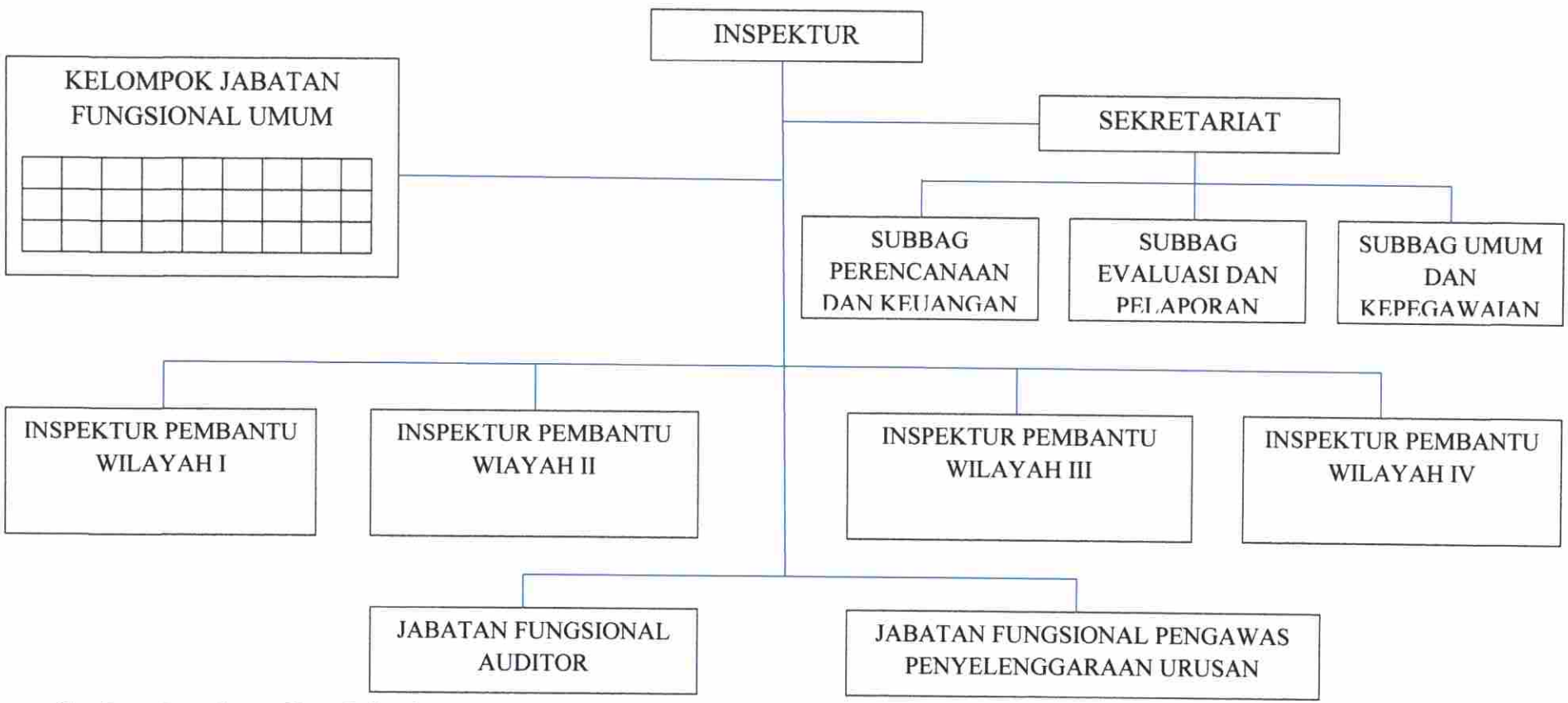

Sumber : Inspektorat Kota Palembang,2015

b. Pembagian Tugas

Berdasarkan struktur organisasi dari Inspektorat Kota Palembang berikut di kemukakan tugas dari setiap unit kerja masing-masing yaitu:

1) Inspektur

a) Inspektur mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

b) untuk melaksanakan tugas inspektur mempunyai fungsi:

(1) memimpin kegiatan pengawasan dan urusasn kesekretariatan pada setiap wilayah yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh walikota.

(2) Perencanaan program pengawasan.

(3) Perumusan, penjabaran, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan fasilitas pengawasan.

(4) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

(5) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kota dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

(6) Monitoring, evaluasi, pelaporan.

(7) Memberikan masukan dan atensi kepada Walikota atas kebajikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kota, dan

(8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Sekretariat

a) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat serta mengkoordinasikan penyusunan program daan penyelenggaraan tugas-tugas inspektur pembantu wilayah secara terpadu.

b) Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

(1) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;

(2) Penghimpunan, pengolahan, penialaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah;

(3) Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

(4) Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;

(5) Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Inspektur Pembantu Wilayah secara terpadu;

(6) Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan dan perpustakaan;

(7) Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;

(8) Pengelolaan urusan keuangan;

(9) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan

(10) Pelaksanaan sosialisasi dan pembiayaan bidang pengawasan.

3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan dan anggaran keuangan inspektorat, menghimpun, dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan dan keuangan.

b) Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

(1) Penyiapan dan penyusunan program kerja pengawasan;

(2) Penyusunan anggaran tahunan Inspektorat;

(3) Penyusunan dan penyiapan laporan kegiatan inspektorat;

(4) Penyiapan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pelaksanaan pengawasan;

(5) Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;

(6) Penyiapan pelaporan pelaksanaan anggaran kegiatan Inspektorat; dan

(7) Penyusunan laporan keuangan Inspektorat.

4) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

a) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyiapkan laporan hasil pengawasan aparat dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

b) Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

(1) Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

(2) Pengadministrasian laporan hasil pengawasan.

(3) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan.

(4) Penyusunan statistic hasil pengawasan.

(5) Penyelenggaraan kerjasama pengawasan.

(6) Penyusunan laporan hasil pengawaasan.

5) Sub Bagian Umum dan kepegawaian

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

b) Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

(1) Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan.

(2) Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan.

(3) Pengelolaan urusan kepegawaian

(4) Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

6) Inspektur Pembantu Wilayah I

a) Inspektur pembantu wilaya I, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan penanganan kasus pengaduan serta pemeriksaan di Instansi dan Satuan Kerja di wilayah yang

menjadi tanggung jawabnya dan atau sesuai dengan perintah Inspektur.

b) Untuk melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas:

(1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pengawasan diwilayah dibawah tanggung jawabnya.

(2) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan di wilayah I.

(3) Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah I.

(4) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah I. dan

(5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oelh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Inspektur Pembantu Wilayah II.

a) Inspektur Pembantu Wilayah II, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan penanganan kasus pengaduan serta pemeriksaan di Instansi dan Satuan Kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan atau sesuai dengan perintah Inspektur.

b) Untuk melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:

(1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pengawasan di wilayah II.

(2) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan di wilayah II.

(3) Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah II.

(4) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah II. dan

(5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oelh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) Inspektur Pembantu Wilayah III.

a) Inspektur Pembantu Wilayah III, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan penanganan kasus pengaduan serta pemeriksaan di Instansi dan Satuan Kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan atau sesuai dengan perintah Inspektur.

b) Untuk melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi;

(1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pengawasan di Wilayah III.

(2) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan di wilayah III.

(3) Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah III.

(4) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah III. dan

(5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oelh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Inspektur Pembantu Wilayah IV.

a) Inspektur pembantu wilayah IV, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan penanganan kasus pengaduan serta pemeriksaan tujuan tertentu di Instansi dan Satuan Kerja di wilayah uang menjadi tanggung jawabnya dan atau sesuai dengan perintah Inspektur.

b) Untuk melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi;

(1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pengawasan diwilayah IV.

(2) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan di wilayah IV.

(3) Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah IV.

(4) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah IV. dan

(5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oelh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10) Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD (Auditor dan P2UPD).

a) Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD (Auditor dan P2UPD) mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dan Instansi dan tugas-tugas pengawasan lain dalam lingkup pemerintah Kota Palembang secara professional dan mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

b) Untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD Inspektorat Kota Palembang mempunyai fungsi;

(1) Perancangan prosedur pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan di SKPD.

(2) Penyusunan program kerja pemeriksaan tugas pokok dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian dan unsur-unsurlain diluar tupoksi SKPD jika dimungkinkan dan diperintahkan oleh pihak yang berwenang memberikan perintah penugasan.

(3) Penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dan instansi dan tugas-tugas pengawasan lain dalam linkup pemerintah Kota Palembang secara professional dan mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

11) Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya.

a) Habatan Fungsional Tertentu lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya secara professional dan mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya.

b) Untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Tertentu lainnya Inspektorat Kota Palembang mempunyai fungsi;

(1) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan jabatan fungsional yang melekat dan keahlian yang dimiliki.

(2) Pembantuan tugas diluar tugas pengawasan.

(3) Penyusunan laporan hasil pekerjaan sesuai dengan bidang tugas.

3. Visi dan Misi Inspektorat Kota Palembang.

a. Visi

Aparatur Pengawas Internal yang professional Dalam Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* guna Pencapaian Palembang Emas 2018.

b. Misi

1) Menciptakan Aparatur pengawasan yang berdayaguna dan berhasilguna
2) Mendorong mewujudkan pelaksanaan *good governance* dan *clean government* di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

4. Data Inspektorat Kota Palembang.

a. Data karyawan

Inspektorat Kota Palembang memiliki karyawan yang berjumlah 54 karyawan yang terbagi menjadi beberapa bagian yaitu : Auditor sebanyak 27 orang, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) sebanyak 5 orang, dan 22 orang karyawan.

b. Data Jawaban Responden

Tabel IV. 1

Jawaban Responden

1) Jawaban Responden Tentang Indikator Lingkungan Pengendalian

No.	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Apakah terdapat tindakan disiplin terhadap penyimpangan kebijakan atau prosedur aturan perilaku ?	19	76%	6	24%	25	100%
2.	Apakah terdapat pertangung jawaban dari pimpinan atas adanya intervensi atau pengabaian atau pengendalian intern ?	21	84%	4	16%	25	100%
3.	Apakah terdapat standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi ?	21	84%	4	16%	25	100%
4.	Apakah terdapat pelatihan dan pembimbingan bagi karyawan untuk meningkatkan kompetensi mereka ?	19	76%	6	24%	25	100%
5.	Apakah pimpinan menerapkan manajemen berbasis kinerja ?	19	76%	6	24%	25	100%
6.	Apakah pimpinan mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP, antara lain :	20	80%	5	20%	25	100%

	• Pencatatan dan pelaporan keuangan • System manajemen informasi • Pengelolaan pegawai • Pengawasan, baik intern maupun ekstern						
7.	Apakah pimpinan memiliki sikap yang positif dan responsive terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan ?	21	84%	4	16%	25	100%
8.	Apakah pimpinan instansi memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab ?	21	84%	4	16%	25	100%
9.	Apakah pimpinan melakukan evaluasi dan penyesuaian secara periodic terhadap struktur organisasi ?	19	76%	6	24%	25	100%
10.	Apakah wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi ?	22	88%	3	12%	25	100%
11.	Apakah pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP ?	22	88%	3	12%	25	100%

12.	Apakah terdapat mekanisme untuk memberika keyakinan yang memdai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi ?	20	80%	5	20%	25	100%
13.	Apakah terdapat upaya memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan (good governance) tugas dan fungsi instansi ?	24	96%	1	4%	25	100%
	Total Persentase		82,5%		17,5%		100%

2) Jawaban Responden Tentang Indikator Penilaian Resiko.

No.	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Apakah pimpinan instansi menetapkan tujuan instansi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan ?	24	96%	1	4%	25	100%
2.	Apakah pimpinan telah menetapkan strategi operasional yang konsisten dengan rencana strategis dan rencana penilaian resiko ?	22	88%	3	12%	25	100%
3.	Apakah tujuan pada tingkatan kegiatan didukung sumber daya instansi yang cukup ?	20	80%	5	20%	25	100%
4.	Apakah semua tingkatan pimpinan	19	76%	6	24%	25	100%

	instansi terlibat dalam proses penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komperhensif ?						
5.	Apakah resiko dari factor internal dan eksternal telah diidentifikasi dengan mekanisme yang memadai ?	16	64%	9	36%	25	100%
6.	Apakah penilaian atas factor lain yang dapat meningkatkan resiko telah dilaksanakan ?	19	76%	6	24%	25	100%
7.	Apakah pimpinan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima ?	18	72%	7	28%	25	100%
	Total Persentase		78,6%		21,4%		100%

3) Jawaban Responden Tentang Indikator Kegiatan Pengendalian

No.	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Apakah pemahaman bersama atas visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi telah tercermin dalam revisi dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan pedoman panduan kerja lainnya dan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada seluruh pegawai ?	19	76%	6	24%	25	100%
2.	Apakah instansi telah memiliki persyaratan jabatan dan menetapkan kinerja yang diharapkan untuk setiap	19	76%	6	24%	25	100%

	posisi pimpinan ?						
3.	Apakah pegawai telah diberikan orientasi, pelatihan, dan kelengkapan kerja untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab, meningkatkan kinerja, meningkatkan kemampuan, serta memenuhi tuntunan kebutuhan organisasi yang beubah-ubah ?	18	72%	7	28%	25	100%
4.	Apakah instansi telah secara berkala melaksanakan penilaian risiko secara periodic yang komperhensif ?	19	76%	6	24%	25	100%
5.	Apakah pemilik sumber daya mengidentifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal ?	17	68%	8	32%	25	100%
6.	Apakah instansi telah menetapkan pengendalian fisik dan pengendalian logic untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi ?	20	80%	5	20%	25	100%
7.	Apakah seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan sudah diuji dan disetujui ?	15	60%	9	36%	25	100%
8.	Apakah instansi telah menetapkan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunka (software libraries) termasuk pemberian label,	13	52%	12	48%	25	100%

	pembatasan akses, dan penggunaan kepustakaan perangkat lunak yang terpisah ?						
9.	Apakah akses keadan penggunaan perangkat lunak sistem dikendalikan dan dipantau ?	17	68%	8	32%	25	100%
10.	Apakah instansi mengendaliakn dokumen sumber ?	22	88%	3	12%	25	100%
11.	Apakah telah dilakukan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data ?	22	88%	3	12%	25	100%
12.	Apakah data yang salah dengan segera dicatat, dilaporan, diinvestigasi, dan diperbaiki ?	19	76%	6	24%	25	100%
13.	Apakah pimpnan instansi menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisai kepada pegawai ?	21	84%	4	16%	25	100%
	Total Persentase		78,8%		21,2%		100%

4) Jawaban Responden Tentang Indikator Informasi dan Komunikasi

No.	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Jumlah	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Apakah informasi dari sumber internal dan eksternal didapat dan disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai bagian dari pelaporan instansi sehubungan dengan pencapaian kinerja operasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan ?	23	92%	2	8%	25	100%

2.	Apakah pimpinan instansi telah memastikan terjalinnya komunikasi internal yang efektif ?	19	76%	6	24%	25	100%
3.	Apakah pimpinan instansi telah memastikan bahwa sudah terjalin komunikasi eksternal yang efektif yang memiliki dampak signifikan terhadap program, proyek, operasi, dan kegiatan lain termasuk penganggaran dan pendanaannya ?	19	76%	6	24%	25	100%
4.	Apakah pimpinan instansi telah menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting kepada pegawai dan lainnya ?	24	96%	1	4%	25	100%
	Total Persentase		85%		15%		100%

5) Jawaban Responden Tentang Indikator Pemantauan Pengendalian Intern

No.	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Apakah dalam proses telah melaksanakan kegiatan rutin, pegawai instansi telah mendapatkan informasi berfungsinya pengendalian intern secara efektif ?	16	64%	9	36%	25	100%
2.	Apabila struktur organisasi dan supervise yang memadai telah membantu mengawasi fungsi dalam pengendalian intern ?	19	76%	6	24%	25	100%
3.	Apakah rapat dengan pegawai digunakan juga untuk meminta masukan tentang efektivitas	16	64%	9	36%	25	100%

	pengendalian intern ?						
4.	Apakah pegawai secara berkala diminta untuk menyatakan secara tegas apakah mereka sudah mematuhi kode etik atau peraturan sejenis mengenai perilaku yang diharapkan ?	16	64%	9	36%	25	100%
5.	Apakah ruang lingkup dan frekuensi evaluasi pengendalian intern yang terpisah telah memadai bagi instansi ?	20	80%	5	20%	25	100%
6.	Apakah metodelogi evaluasi intern instansi telah logis dan memadai ?	21	84%	4	16%	25	100%
7.	Apakah kelemahan yang ditemukan selama evaluasi terpisah segera diselesaikan ?	18	72%	7	28%	25	100%
	Total Persentase		72%		28%		100%

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan yang akan dilakukan penulis dalam bab ini mengenai evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Kota Palembang seperti yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu.

Unsur yang digunakan untuk mengetahui telah berjalan dengan baik atau tidaknya SPIP pada Inspektorat Kota Palembang, maka penulis melakukan penelitian melalui pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner, yang dilakukan mulai dari tanggal 13 Februari 2015, dan dikembalikan pada tanggal 3 Maret 2015, kepada para auditor dan pejabat pengawas urusan pemerintah di daerah (P2UPD) Inspektorat Kota Palembang, Penelitian bertujuan untuk mengetahui respon karyawan terhadap sistem

pengendalian intern pemerintah di Inspektorat Kota Palembang, namun terlebih dahulu perlu diketahui gambaran mengenai karakteristik responden.

1. Gambaran Karakteristik Responden

Jumlah kuesioner yang telah disebarkan sebanyak 32 responden, jumlah kuesioner yang tidak kembali adalah 7 kuesioner sehingga jumlah kuesioner yang menjadi sumber data untuk diolah dan dianalisis adalah 25 responden.

a. Gambaran Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin.

Karakteristik berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel IV. 2 berikut :

Tabel IV.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah	%
1.	Pria	15	60%
2.	Wanita	10	40%
Total		25	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan tabel IV.3 diatas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden pria berjumlah 15 atau 60% dan responden wanita berjumlah 10 atau 40%.

b. Gambaran Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir.

Karakteristik berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel IV.3 berikut :

Tabel IV.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Keterangan	Jumlah	%
1.	SMA	0	0
2.	Diploma	0	0
3.	Sarjana	12	48%
4.	Pasca Sarjana	13	52%
Total		25	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan tabel IV.4 diatas maka dapat disimpulkan bahwa responden yang berpendidikan terakhir SMA tidak ada, responden yang berpendidikan terakhir Diploma tidak ada, responden berpendidikan terakhir Sarjana berjumlah 12 atau 48%, responden yang berpendidikan terakhir Pasca Sarjana berjumlah 13 atau 52%.

c. Gambaran Karakteristik Berdasarkan Usia.

karakteristik berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut :

Tabel IV.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Keterangan	Jumlah	%
1.	Dibawah 30 tahun	1	4%
2.	31-40 tahun	9	36%
3.	Diatas 40 tahun	15	60%
Total			100%

Sumber : Data Priemer Diolah, 2015

Berdasarkan tabel IV.5 diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang berusia dibawah 30 tahun berjumlah satu orang atau 4%, responden yang berusia 31-40 tahun berjumlah Sembilan orang

atau 36%, dan responden yang berusia diatas 40 tahun berjumlah 15 orang atau 60%.

d. Gambaran Karakteristik Berdasarkan Posisi Jabatan.

Karakteristik berdasarkan posisi jabatan dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut :

Tabel IV.5

Karakteristik Responden berdasarkan Posisi Jabatan

No.	Keterangan	Jumlah	%
1.	Auditor Madya	9	36%
2.	Auditor Muda	8	32%
3.	Auditor Pertama	5	20%
4.	P2UPD	3	12%
Total		25	100%

Sumber : Data Priemer Diolah. 2015

Berdasarkan tabel IV.6 diatas dapat disimpulkan bahwa responden dengan jabatan Auditor Madya berjumlah Sembilan orang atau 39%, responden dengan jabatan Auditor Muda berjumlah delapan orang atau 32%, reponden dengan jabatan Auditor Pertama berjumlah lima orang atau 20%, dan responden dengan jabatan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Didaerah (P2UPD) berjumlah tiga orang atau 12%.

2. Pembahasan Jawaban Responden.

analisis pembahasan kuesioner yang penulis sajikan terdiri dari lima indikator yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

b. Penilaian Resiko

c. Kegiatan Pengendalian

d. Informasi dan Komunikasi

e. Pemantauan Pengendalian Intern.

Berikut pembahasan hasil kuesioner yang mewakili lima indikator dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Intern Pemerintah. Terdiri dari Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Intern.

a. Analisis Lingkungan pengendalian

Dari hasil jawaban pertanyaan tentang apakah terdapat tindakan disiplin terhadap penyimpangan kebijakan atau prosedur aturan perilaku diperoleh persentase sebesar 76% yang mengatakan ya dan sebesar 24% mengatakan tidak. Alasan responden menjawab ya karena pimpinan instansi harus mengambil tindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti pelanggaran kebijakan, prosedur, ataupun aturan perilaku. Dari hasil jawaban ini dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan integritas terhadap penyimpngan kebijakan atau prosedur aturan perilaku dikatakan telah baik karena dalam menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan, dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku harus didasarkan dengan peraturan yang berlaku.

Hasil jawaban pertanyaan tentang apakah terdapat pertanggungjawaban dari pimpinan atas adanya intervensi atau pengabaian atau pengendalian intern diperoleh persentase sebesar 84% yang mengatakan ya dan sebesar 16% mengatakan tidak. Alasan responden menjawab ya Karena pimpinan harus mempertanggungjawabkan atas adanya intervensi dan haruslah sesuai dengan peraturan. Dari hasil jawaban ini dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan integritas pertanggungjawaban pimpinan terhadap adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern telah dilaksanakan dengan sangat baik sesuai dengan peraturan.

Hasil jawaban pertanyaan tentang apakah terdapat standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi diperoleh persentase sebesar 84% menjawab ya dan sebsear 16% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena pimpinan instansi harus mempertimbangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan untuk setiap masing-masing jabatan. Persentase ini mengindikasikan bahwa standar kompetensi setiap tugas dan fungsi telah diterapkan dengan sangat baik, karena kompetensi karyawan merupakan unsur yang sangat penting dari sebuah organisasi atau instansi.

Hasil jawaban pertanyaan tentang apakah terdapat pelatihan dan pembimbingan bagi karyawan untuk meningkatkan kompetensi mereka, diperoleh persentase sebesar 76% menjawab ya dan 24%

menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena instansi harus menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan terhadap karyawan untuk membantu meninggkatkan kompetensi pekerjaannya. Persentase ini mengindikasikan bahwa pelatihan dan pembimbingan bagi karyawan telah diterapkan dengan baik walaupun belum benar-benar efektif karena pelatihan dan pembimbingan belum dilaksanakan secara berkesinambungan atau berkelanjutan.

Hasil jawaban pertanyaan tentang apakah pimpinan menerapkan manajemen berbasis kinerja, diperoleh persentasae sebesar 76% menjawab ya dan 24% menjawab tidak. Persentase ini mengindikasikan bahwa manajemen berbasis kinerja telah diterapkan oleh pimpinan dengan baik walaupun masih terdapat kelemahan seperti kemampuan manajerial yang seharusnya dimiliki oleh pimpinan instansi belum memiliki pengalaman yang luas dalam pengelolaan instansi pemerintah.

Hasil dari jawaban pertanyaan tentang apakah pimpinan mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP, diperoleh persentase sebesar 80% menjawab ya dan sebesar 20% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena pimpinan instansi diharuskan mendukung fungsi dalam penerapan SPIP seperti menyelenggarakan akuntansi dan anggaran untuk pengendalian kegiatan dan evaluasi kinerja. Persentase ini mengindikasikan bahwa pimpinan telah mendukung fungsi tertentu dalam menerapkan SPIP

dengan baik. Antara lain seperti pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi, pengelolaan pegawai, dan pengawasan, baik intern maupun ekstern.

Hasil dari jawaban pertanyaan tentang apakah pimpinan memiliki sikap yang positif dan responsif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan, diperoleh persentase sebesar 84% menjawab ya dan sebesar 16% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena pimpinan harus mempunyai sikap yang positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan agar laporan keuangan sesuai dengan realita atau kebutuhannya. Dapat disimpulkan bahwa persentase ini mengindikasikan bahwa pimpinan melakukan kepemimpinannya dengan kondusif dan diterapkan dengan sangat baik.

Hasil dari jawaban pertanyaan tentang apakah pimpinan instansi memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab, diperoleh persentase sebesar 84% menjawab ya dan sebesar 16% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena pimpinanlah yang bertanggung jawab atas kegiatan atau fungsi utama sepenuhnya menyadari tugas dan tanggung jawab sehingga harus memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawabnya terhadap pegawai. Dapat disimpulkan persentase ini mengindikasikan bahwa pimpinan instansi telah memberikan kejelasan dalam wewenang dan tanggungjawab dengan sangat baik.

Hasil dari jawaban pertanyaan tentang apakah pimpinan melakukan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap struktur organisasi, diperoleh persentase sebesar 76% menjawab ya dan 24% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena pimpinan harus mengevaluasi dan menyesuaikan struktur organisasi secara periodik agar sesuai dengan perubahan lingkungan saat ini. Dapat disimpulkan persentase ini mengindikasikan bahwa pimpinan instansi telah melakukan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap struktur organisasi dengan baik.

Hasil dari jawaban pertanyaan tentang apakah wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi, diperoleh persentase sebesar 88% menjawab ya dan 12% menjawaab tidak. Alasan responden menjawab ya karena wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkan dengan jelas didalam instansi. Karena wewenang harus diberikan kepada pegawai yang tepat agar sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan pegawainya. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan pada elemen ini telah diterapkan dengan sangat baik, walaupun belum benar-benar efektif karena pendelegasian atas wewenang dan tanggungjawab yang dibebankan kepada para pegawai belum dikomunikasikan dengan merata kepada seluruh pegawai.

Hasil dari jawaban pertanyaan tentang apakah pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP, diperoleh persentase sebesar 88% menjawab ya dan 12% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena pegawai yang diberikan wewenang harus paham terhadap wewenang yang diberikan terkait tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan pada elemen ini telah diterapkan dengan sangat baik, walaupun belum benar-benar efektif karena masih terdapat pegawai yang masih kurang paham terhadap pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

Hasil dari jawaban pertanyaan tentang apakah terdapat mekanisme untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraaan tugas dan fungsi instansi, diperoleh persentase sebesar 80% menjawab ya dan 20% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena hal ini sangat perlu diperhatikan untuk menjaga mutu hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan pada elemen ini telah diterapkan dengan sangat baik.

Hasil dari jawaban pertanyaan tentang apakah terdapat upaya memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan (good governance) tugas dan fungsi instansi, diperoleh persentase

sebesar 96% menjawab ya dan 4% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena telah adanya upaya dari instansi untuk meningkatkan dan memelihara kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa upaya dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan (good governance) tugas dan fungsi telah diterapkan dengan sangat baik.

Tabel IV.6

Jawaban Responden Tentang Indikator Lingkungan Pengendalian

No.	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Apakah terdapat tindakan disiplin terhadap penyimpangan kebijakan atau prosedur aturan perilaku ?	19	76%	6	24%	25	100%
2.	Apakah terdapat pertangung jawaban dari pimpinan atas adanya intervensi atau pengabaian atau pengendalian intern ?	21	84%	4	16%	25	100%
3.	Apakah terdapat standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi ?	21	84%	4	16%	25	100%
4.	Apakah terdapat	19	76%	6	24%	25	100%

	pelatihan dan pembimbingan bagi karyawan untuk meningkatkan kompetensi mereka ?						
5.	Apakah pimpinan menerapkan manajemen berbasis kinerja ?	19	76%	6	24%	25	100%
6.	Apakah pimpinan mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP, antara lain : • Pencatatan dan pelaporan keuangan • System manajemen informasi • Pengelolaan pegawai • Pengawasan, baik intern maupun ekstern	20	80%	5	20%	25	100%
7.	Apakah pimpinan memiliki sikap yang positif dan responsive terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan ?	21	84%	4	16%	25	100%
8.	Apakah pimpinan instansi memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab ?	21	84%	4	16%	25	100%
9.	Apakah pimpinan melakukan evaluasi dan penyesuaian secara periodic terhadap struktur organisasi ?	19	76%	6	24%	25	100%
10.	Apakah wewenang diberikan kepada	22	88%	3	12%	25	100%

	pencapaian tujuan instansi ?						
11.	Apakah pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP ?	22	88%	3	12%	25	100%
12.	Apakah terdapat mekanisme untuk memberika keyakinan yang memdai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi ?	20	80%	5	20%	25	100%
13.	Apakah terdapat upaya memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan (good governance) tugas dan fungsi instansi ?	24	96%	1	4%	25	100%
	Total Persentase		82,5%		17,5%		100%

Dari hasil semua jawaban pertanyaan indikator lingkungan pengendalian memperoleh persentase sebesar 82,5%, persentase ini mengindikasikan bahwa indikator lingkungan pengendalian pada Inspektorat Kota Palembang telah berjalan dengan sangat baik.. karena terlihat dari adanya upaya Inspektorat Kota Palembang dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan (*good governance*) tugas dan fungsi instanisi dijalankan dengan baik.

b. Analisis Penilaian Resiko.

Dari hasil jawaban tentang pertanyaan apakah pimpinan instansi menetapkan tujuan instansi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, diperoleh persentase sebesar 96% menjawab ya dan 4% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena instansi harus mempunyai pedoman untuk menetapkan suatu tujan instansi agar terarah kepada tujuan tersebut. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan tujuan instansi telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan sangat baik.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah pimpinan telah menetapkan strategi operasional yang konsisten dengan rencana strategis dan rencana penilaian resiko, diperoleh persentase sebesar 88% menjawab ya dan 12% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena strategi operasional yang baik akan mendukung tujuan instansi secara keseluruhan. Persentase ini mengindikasikan bahwa pada elemen ini telah diterapkan dengan sangat baik karena tujuan Instansi Pemerintah wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah dengan baik dengan menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian resiko.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah tujuan pada tingkatan kegiatan didukung sumber daya instansi yang cukup, diperoleh persentase sebesar 80% menjawab ya dan 20% menjawab tidak.

Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan pada elemen ini telah diterapkan dengan sangat baik. Alasan responden menjawab ya karena dalam mencapai tujuan instansi secara menyeluruh setiap tingkatan instansi sewajarnya memiliki tujuan dalam setiap kegiatan yang dilakukan pegawai dalam setiap instansi, namun masih terdapat kelemahan seperti kurang tepatnya penempatan posisi pegawai yang sesuai dengan pendidikan yang mereka punya dengan posisi yang ada.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah semua tingkatan pimpinan instansi terlibat dalam proses penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komperhensif, diperoleh persentase sebesar 76% menjawab ya dan 24% menjawab tidak. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen-elemen ini telah diterapkan dengan baik. Namun masih terdapat kelemahan bahwa tidak seluruhnya pimpinan instansi dapat menetapkan tujuan kegiatan secara menyeluruh.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah resiko dari faktor internal dan eksternal telah diidentifikasi dengan mekanisme yang memadai, diperoleh persentase sebsesar 64% menjawab ya dan 36% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena masih kurangnya identifikasi resiko dari faaktor internal maupun eksternal. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan baik, namun hal ini masih banyak kekurangan yang terjadi dalam pengidentifikasian resiko yang terdapat pada setiap

kegiatan yang menyeluruh karena belum ada identifikasi resiko dari faktor-faktor internal maupun eksternal dengan mekanisme tertentu yang telah memadai.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan resiko telah dilaksanakan, diperoleh persentase sebesar 76% menjawab ya dan 24% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena penilaian dari faktor lain juga mempengaruhi tingkaat resiko yang terjadi seperti resiko yang timbul dari kegagalan pencapaian misi, tujuan, maupun yang lainnya maka dari itu harus dilakukan penilaian terhadap faktor-faktor lain. Dapat disimpulkan bahwa persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan baik, namun penulis melihat peningkatan resiko dari faktor lain seperti resiko yang timbul dari kegagalan pencapaian misi, tujuan, dan sasaran masa lalu atau keterbatasan anggaran, pelanggaran penggunaan dana serta risiko yang melekat pada misi instansi pemerintah, belum diidentifikasi secara layak.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah pimpinan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima, diperoleh persentase sebesar 72% menjawab ya dan 28% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena harus diterapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dihadapi. Dapat disimpulkan bahwa persentase ini

mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan baik karena pendekatan penentuan tingkat resiko yang dapat diterima tetap wajar dan pimpinan instansi pemerintah bertanggung jawab atas penetapannya.

Tabel IV.7

Jawaban Responden Tentang Indikator Penilaian Resiko.

No.	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Apakah pimpinan instansi menetapkan tujuan instansi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan ?	24	96%	1	4%	25	100%
2.	Apakah pimpinan telah menetapkan strategi operasional yang konsisten dengan rencana strategis dan rencana penilaian resiko ?	22	88%	3	12%	25	100%
3.	Apakah tujuan pada tingkatan kegiatan didukung sumber daya instansi yang cukup ?	20	80%	5	20%	25	100%
4.	Apakah semua tingkatan pimpinan instansi terlibat dalam proses penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komperhensif ?	19	76%	6	24%	25	100%
5.	Apakah resiko dari factor internal dan eksternal telah diidentifikasi dengan mekanisme yang memadai ?	16	64%	9	36%	25	100%
6.	Apakah penilaian atas factor lain yang dapat	19	76%	6	24%	25	100%

	meningkatkan resiko telah dilaksanakan ?						
7.	Apakah pimpinan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima ?	18	72%	7	28%	25	100%
	Total Persentase		78,6%		21,4%		100%

Dari hasil semua jawaban pertanyaan indikator Penilaian Resiko memperoleh total persentase sebesar 78,6%, persentase ini mengindikasikan indikator penilaian resiko pada Inspektorat Kota Palembang telah berjalan dengan baik. Karena terlihat dari pimpinan instansi telah menetapkan tujuan instansi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pimpinan telah menetapkan strategi operasional yang konsisten dengan rencana strategis dan rencana penilaian resiko.

c. Analisis Kegiatan Pengendalian

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah pemahaman bersama atas visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi telah tercermin dalam revisi dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan pedoman panduan kerja lainnya dan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada seluruh pegawai, diperoleh persentase sebesar 76% menjawab ya dan 24 menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena untuk memberikan kejelasan terhadap tujuan instansi. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan baik.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah instansi telah memiliki persyaratan jabatan dan menetapkan kinerja yang diharapkan untuk setiap posisi pimpinan, diperoleh persentase sebesar 76% menjawab ya dan 24% menjawab tidak. Persentase ini mengindikasikan bahwa penrapan elemen ini telah diterapkan dengan baik, karena pimpinan telah memiliki persyaratan jabatan dan menetapkan kinerja yang diharapkan untuk setiap posisi pimpinan.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah pegawai telah diberikan orientasi, pelatihan, dan kelengkapan kerja untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, meningkatkan kinerja, meningkatkan kemampuan, serta memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi yang berubah-ubah, diperoleh persentse sebesar 72% menjawab ya dan 28% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena pelatihan ataupun yang lainnya sangat penting terhadap tujuan instansi agar meningkatkan kinerja pegawai sehingga dapat meningkatkan tercapainya tujuan instansi tersebut. Persentase ini mengindikasikan bahwa penrapan elemen ini telah diterapkan dengan baik, karena instansi telah memberikan peltihan dan kelengkapan kerja kepada pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah instansi telah secara berkala melaksanakan penilaian resiko secara periodik yang komperhensif, diperoleh persentase sebesar 76% menjawab ya dan 24% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena penilaian

resiko dilaksanakan dan didokumentasikan harus secara teratur. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan baik karena penilaian resiko dilaksanakan dan didokumentasikan secara teratur dan pada saat sistem, fasilitas, atau kondisi lainnya berubah.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah pemilik sumberdaya mengidentifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal, diperoleh persentase sebesar 68% menjawab ya dan 32% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena dalam pelaksanaannya masih kurang diterapkan dengan baik. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan baik, namun masih belum benar-benar efektif dalam menjalankannya.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah instansi telah menetapkan pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi, diperoleh persentase sebesar 80% menjawab ya dan 20% menjawab tidak. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan sangat baik namun masih belum benar-benar efektif seperti penggunaan komputer yang didalamnya memiliki data-data penting instansi yang belum dilakukan otorisasi. Untuk itu harus dilakukan investigasi atas pelanggaran dan mengambil tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan sudah diuji dan disetujui, diperoleh persentase sebesar 60% menjawab ya dan 40% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena pengendalian terhadap perangkat lunak masih kurang efektif. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan cukup baik, karena perangkat lunak yang baru dan dimutakhirkan masih belum diuji dengan baik, serta instansi belum menetapkan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas keputusan perangkat lunak dengan maksimal.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah instansi telah menetapkan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak (*software libraries*) termasuk pemberian label, pembatasan akses, dan penggunaan kepustakaan perangkat lunak yang terpisah, diperoleh persentase sebesar 52% menjawab ya dan 48% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena instansi masih kurang efektif dalam menjalankan atau menerapkannya. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan cukup baik namun masih belum terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak yang secara efektif.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah akses keadaan penggunaan perangkat lunak sistem dikendaliakn dan dipantau,

diperoleh pesentase sebesar 68% menjawab ya dan 32% menjawab tidak. Karena masih kurangnya pengendalian terhadap perangkat lunak sistem di instansi. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan baik namun masih belum benar-benar efektif karena penggunaan perangkat lunak sistem masih belum dikendalikan dan dipantau scara efektif.

Hasil jawaban pertanyaan tentang apakah instansi mengendalikan dokumen sumber, diperoleh persentase sebesar 88% menjawab ya dan 12% menjawab tidak. Persentase ini mengindikasaikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan sangat baik karena instansi telah mengendalikan dokumen sumber dengan cara dokumen sumber diberikan nomor urut tercetak dan akses ke dokumen sumber yang masih kosong dibatasi.

Hasil jawaban pertanyaan tentang apakah telah dilakukan rekonsiliasi data memverifikasi kelengkapan data, diperoleh persentase sebesar 88% menjawab ya dan 12% menjawab tidak. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan sangat baik, namun masih belum dilakukan dengan merata karena tidak seluruh data dientri dan diproses ke dalam komputer. Oleh karena itu, pengendalian yang baik dalam kelengkapan data yang menghasilkan informasi yang memadai dan akurat akan menjadikan pekerjaan pegawai dalam instansi berjalan dengan efektif.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah data yang salah dengan segera dicatat, dilaporkan, diinvestigasi, dan diperbaiki, diperoleh persentase sebesar 76% menjawab ya dan 24 % menjawab tidak. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan baik namun masih belum benar efektif karena lemahnya pengidentifikasian validasi apabila ada data yang salah dimasukkan kedalam komputer, sehingga menyebabkan instansi terlambat untuk melkukan pembenahan dari data yang salah tersebut. Untuk itu diperlukan suatu pengendalian yang berkesinambungan untuk menjaga akurasi data yang dihasilkan agar menjadi lebih efektif.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah pimpinan instansi menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai, diperoleh persentase sebesar 84% menawab ya dan 16% menjawab tidak. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan sangat baik, karena hanya diperlukan suatu komunikassi yang baik dari pimpinan ke pegawai dalam instansi agar tidak terjadi tumpang tindih otorisasi yang kelirudari masing-masing pegawai yang berwenang dalam linkup otorisasinya.

Tabel IV.8

Jawaban Responden Tentang Indikator Kegiatan Pengendalian

No.	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Apakah pemahaman	19	76%	6	24%	25	100%

	bersama atas visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi telah tercermin dalam revisi dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan pedoman panduan kerja lainnya dan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada seluruh pegawai ?						
2.	Apakah instansi telah memiliki persyaratan jabatan dan menetapkan kinerja yang diharapkan untuk setiap posisi pimpinan ?	19	76%	6	24%	25	100%
3.	Apakah pegawai telah diberikan orientasi, pelatihan, dan kelengkapan kerja untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab, meningkatkan kinerja, meningkatkan kemampuan, serta memenuhi tuntunan kebutuhan organisasi yang beubah-ubah ?	18	72%	7	28%	25	100%
4.	Apakah instansi telah secara berkala melaksanakan penilaian risiko secara periodic yang komperhensif ?	19	76%	6	24%	25	100%
5.	Apakah pemilik sumber daya mengidentifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal ?	17	68%	8	32%	25	100%
6.	Apakah instansi telah menetapkan pengendalian fisik dan pengendalian logic untuk mencegah dan	20	80%	5	20%	25	100%

	mendeteksi akses yang tidak diotorisasi ?						
7.	Apakah seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan sudah diuji dan disetujui ?	15	60%	9	36%	25	100%
8.	Apakah instansi telah menetapkan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak (software libraries) termasuk pemberian label, pembatasan akses, dan penggunaan kepustakaan perangkat lunak yang terpisah ?	13	52%	12	48%	25	100%
9.	Apakah akses keadan penggunaan perangkat lunak sistem dikendalikan dan dipantau ?	17	68%	8	32%	25	100%
10.	Apakah instansi mengendaliakn dokumen sumber ?	22	88%	3	12%	25	100%
11.	Apakah telah dilakukan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data ?	22	88%	3	12%	25	100%
12.	Apakah data yang salah dengan segera dicatat, dilaporan, diinvestigasi, dan diperbaiki ?	19	76%	6	24%	25	100%
13.	Apakah pimpnan instansi menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisai kepada pegawai ?	21	84%	4	16%	25	100%
	Total Persentase		78,8%		21,2%		100%

Dari hasil semua jawaban pertanyaan indikator Kegiatan Pengendalian memperoleh persentase sebesar 78,8%, persentase ini mengindikasikan bahwa indikastor kegiatan pengendalian pada Inspektorat Kota Palembang telah berjalan dengan baik. Karena pada indikator kegiatan pengendalian pada Inspektorat Kota Palembang dikatakan telah baik terlihat dari telah dilakukan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data dan juga pimpinan instansi menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai.

d. Analisis Informassi dan komunikasi

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah informasi dari sumber internal dan eksternal didapat dan disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai bagian dari pelaporan instansi sehubungan dengan pencapaian kinerja operasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperoleh persentase sebesar 92% menjawab ya dan 8% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena sumber yang didapat harus disampaikan kepada pimpinan sebagai laporan. Peresentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan sangat baik. Informasi yang dikelola telah dilaksanakan dengan baik dan tepat, sehingga informasi tersebut dapat menjadi sumbangan yang sangat baik dalam pencapaian tujuan instasni.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah pimpinan instansi telah memastikan terjalinnya komunikasi internal yang efektif, diperoleh persentase sebesaar 76% menjawab ya dan 24% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena instansi harus menjalin komunikasi internal yang baik dan efektif. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan baik namun masih belum benar-benar efektif karena belum sepenuhnya berjalan mekanisme yang memungkinkan informasi mengalir keseluruh bagian dengan lancar.

Hasil jawaban pertanyaan tentang apakah pimpinan instansi telah memastikan bahwa sudah terjalin komunikasi eksternal yang efektif yang memiliki dampak signifikan terhadap program, proyek, operasi, dan kegiatan lain termasuk penganggaran dan pendanaannya, diperoleh persentase sebesar 76% menjawab ya dan 24% menjawab tidak. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan baik namun masih belum benar-benar efektif karena komunikasi eksternal terutama dengan masyarakat yang berjalan kurang efektif. Komunikasi dalam menjalankan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga belum berjalan semestinya, untuk itu diperlukan komunikasi yang baik dan berkesinambungan dari semua pihak untuk mengatasi kelemahan tersebut.

Hasil jawaban pertanyaan tentang apakah pimpinan instansi telah menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting kepada pegawai dan lainnya, diperoleh persentase sebesar 96% menjawab ya dan 4% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena instansi telah menggunakan bentuk dan sarana komunikasi berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran, memorandum, papan pengumuman, dalam mengkomunikasikan informasi yang penting. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan sangat baik. Alasan responden menjawab iya karena bentuk dan sarana komunikasi yang telah ada sudah tersedia dengan memadai, namun instansi masih perlu meningkatkan atau memanfaatkan bentuk dan sarana komunikasai yang sesuai dengan teknolgi sistem informasi saat ini.

Tabel IV.9

Jawaban Responden Tentang Indikator Informasi dan Komunikasi

No.	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Jumlah	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Apakah informasi dari sumber internal dan eksternal didapat dan disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai bagian dari pelaporan instansi sehubungan dengan pencapaian kinerja operasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan ?	23	92%	2	8%	25	100%

2.	Apakah pimpinan instansi telah memastikan terjalinnya komunikasi internal yang efektif ?	19	76%	6	24%	25	100%
3.	Apakah pimpinan instansi telah memastikan bahwa sudah terjalin komunikasi eksternal yang efektif yang memiliki dampak signifikan terhadap program, proyek, operasi, dan kegiatan lain termasuk penganggaran dan pendanaannya ?	19	76%	6	24%	25	100%
4.	Apakah pimpinan instansi telah menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting kepada pegawai dan lainnya ?	24	96%	1	4%	25	100%
	Total Persentase		85%		15%		100%

Dari hasil semua jawaban pertanyaan indikator Informasi dan Komunikasi memperoleh total persentase sebesar 85%, persentase ini mengindikasikan bahwa indikator informasi dan komunikasi pada Inspektorat Kota Palembang telah berjalan dengan sangat baik. Karena terlihat dari pimpinan instansi telah menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting kepada pegawai dan lainnya.

e. Analisis Pemantauan Pengendalian Intern

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah dalam proses telah melaksanakan kegiatan rutin, pegawai instansi telah mendapatkan informasi berfungsinya pengendalian intern secara efektif, diperoleh persentase sebesar 64% menjawab ya dan 36% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena masih belum dilaksanakan dengan rutin terhadap informasi pengendalian intern. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini terlah diterapkan dengan baik, namun penulis masih melihat kurangnya komunikasi informasi mengendai kepatuhan atau hal lain yang mencerminkan berfungsinya pengendalian intern.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah struktur organisasi dan supervisi yang memadai telah membantu mengawasi fungsi dalam pengendalian intern, diperoleh persentase sebesar 76% menjawab ya dan 24% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena struktur organisasi dan supervisi telah membantu mengawasi fungsi pengendalian intern. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan baik, namun masih terdapat kelemahan dalam pemisahan tugas dan tanggung jawab yang digunakan dalam untuk membantu mencegah penyelewengan.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah rapat dengan pegawai digunakan juga untuk meminta masukan tentang efektifitas pengendalian intern, diperoleh persentase sebesar 64% menjawab ya

dan 36% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena pegawai masih kurangnya partisipasi dalam memberikan saran ataupun masukan mengenai pengendalian intern. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan baik, namun masih terdapat kelemahan karena masih kurangnya partisipasi pegawai dalam memberikan saran mengenai pengendalian intern yang harus dipertimbangkan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah pegawai secara berkala diminta untuk menyatakan secara tegas apakah mereka sudah mematuhi kode etik atau peraturan sejenis mengenai perilaku yang diharapkan, diperoleh persentase sebesar 64% menjawab ya dan 36% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena masih kurangnya peraturan terhadap terhadap kode etik. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan baik, namun masih kurangnya suatu peraturan yang menyatakan bahwa pegawai telah mematuhi kode etik atau aturan perilaku dengan tegas dan jelas. Peraturan semacam ini penting untuk meningkatkan kredibilitas pegawai dalam menjalankan pekerjaan mereka.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah ruang lingkup dan frekuensi evaluasi pengendalian intern yang terpisah telah memadai bagi instansi, diperoleh persentase sebesar 80% menjawab ya dan 20% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena ruang lingkup

pengendalian itern yang terpisah telah memadai. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan baik. Karena kegiatan evaluasi terpisah sering diperlukan pada saat adanya kejadian misalnya perubahan besar dalam rencana atau strategi manajemen, pemekaran atau penciutan instansi pemerintah, atau perubahan operasional atau pemrosessan informasai keuangan dan anggaran.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah metodelogi evaluasi intern instansi telah logis dan memadai, diperoleh persentase sebesar 84% menjawab ya dan 16% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena metodelogi evaluasi intern telah logis dan memadai. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah diterapkan dengan baik, namun masih belum benar-benar efektif karena masih kurangnya pemahaman pegawai terhadap metodelogi evaluasi pengendlian intern.

Hasil jawaban tentang pertanyaan apakah kelemahan yang ditemukan selama evaluasi terpisah segera diselesaikan, diperoleh persentase sebesar 72% menjawab ya dan 28% menjawab tidak. Alasan responden menjawab ya karena kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada orang yang bertanggungjawab atas fungsi tersebut. Persentase ini mengindikasikan bahwa penerapan elemen ini telah berjalan dengan efektif, namun masih belum benar-

benar efektif dalam menindaklanjuti kelemahan dari hasil temuan evaluasi terpisah tersebut.

Tabel IV. 10

Jawaban Responden Tentang Indikator Pemantauan Pengendalian Intern

No.	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Apakah dalam proses telah melaksanakan kegiatan rutin, pegawai instansi telah mendapatkan informasi berfungsinya pengendalian intern secara efektif ?	16	64%	9	36%	25	100%
2.	Apabila struktur organisasi dan supervise yang memadai telah membantu mengawasi fungsi dalam pengendalian intern ?	19	76%	6	24%	25	100%
3.	Apakah rapat dengan pegawai digunakan juga untuk meminta masukan tentang efektivitas pengendalian intern ?	16	64%	9	36%	25	100%
4.	Apakah pegawai secara berkala diminta untuk menyatakan secara tegas apakah mereka sudah mematuhi kode etik atau peraturan sejenis mengenai perilaku yang diharapkan ?	16	64%	9	36%	25	100%
5.	Apakah ruang lingkup dan frekuensi evaluasi pengendalian intern yang terpisah telah memadai bagi instansi ?	20	80%	5	20%	25	100%
6.	Apakah metodelogi evaluasi intern instansi telah logis dan memadai ?	21	84%	4	16%	25	100%

7.	Apakah kelemahan yang ditemukan selama evaluasi terpisah segera diselesaikan ?	18	72%	7	28%	25	100%
	Total Persentasae		72%		28%		100%

Dari hasil semua jawaban pertanyaan indikator Kegiatan Pengendalian memperoleh total persentase sebesar 72%, persentase ini mengindikasikan bahwa indikator informasi dan komunikassi pada Inspektorat Kota Palembang telah berjalan dengan baik. Karena terlihat dari ruang linkgup dan frekuensi evaluasi pengendalian intern yang terpisah telah memadai bagi instansi, dan metodelogi evaluasi pengendalian intern instansi telah logis dan memadai.

Dari total hasil kelima indikator seperti lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern memperoleh total persentase sebesar 79,4%. Penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada inspektorat kota palembang telah berjalan dengan baik. Karena pada Inspektorat Kota Palembang, kelima indikator tersebut telah dijalankan dengan baik dan telah sesuai dengan fungsi dari kelima indikator tersebut.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didukung data dan informasi yang telah disajikan dalam bab-bab terdahulu, penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Kota Palembang telah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari kelima indikator seperti indikator lingkungan pengendalian yang memperoleh total persentase sebesar 82,5% yang menunjukkan bahwa pada indikator ini telah berjalan sangat baik, indikator penilaian resiko memperoleh total persentase sebesar 78,6% yang menunjukkan bahwa pada indikator ini telah berjalan dengan baik, indikator kegiatan pengendalian memperoleh total persentase sebesar 78,8% yang menunjukkan bahwa pada indikator ini telah berjalan dengan baik, indikator informasi dan komunikasi memperoleh total persentase sebesar 85% yang menunjukkan bahwa pada indikator ini telah berjalan dengan sangat baik, indikator pemantauan pengendalian intern memperoleh persentase sebesar 72% yang menunjukkan bahwa pada indikator ini telah berjalan dengan baik.

B. Saran-saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dalam menjalankan kelima komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatas diperlukan kajian lebih lanjut lagi dari semua pihak.
2. Dalam bidang sumber daya manusia masih harus diberikan pelatihan-pelatihan atau pemahaman lagi terhadap Sistem Pengendalian Intern pemerintah agar pegawai lebih memahami lagi terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Mahmudi. (2010). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Uii Press

Nuning Hindriani. (2012). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kbupaten Madiun).* (online). (http://www.wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/238, diakses pada 23 November 2014).

Nur Indrianto dan Bambang Supomo. (2009). *Metode Penelitian Bisnis.* Yogyakarta: Penerbit BPFE.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Redi Erwansyah. (2012). *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat.* Skripsi Tidak Diterbitkan. Indralaya: Program Studi Akuntansi, Universitas Sriwijaya Indralaya.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Penerbit CV Alfabeta.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHA PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Website: umpalembang.net/feump Email: feumpalembang@gmail.com

Alamat: Jl. Jend. A. Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp/Fax: (0711) 511433 - (0711) 518018

بسم الله الرحمن الرحيم

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG

Perihal : Permohonan Pengisian Kueisioner

Kepada Yth
Bapak/Ibu Responden
di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir Program Strata Satu (S1) pada Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, yang mana salah satu persyaratannya dalam penelitian, maka untuk keperluan salah satu cara mendapatkan data adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, sebagaimana "Daftar Kuesioner" yang telah dilampirkan bersamaan surat ini.

Judul penelitian ini adalah **Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Inspektorat Kota Palembang.**

Dengan segala kerendahan hati, peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini sebagai data yang akan dipergunakan dalam penelitian. Sesuai

dengan kode etik dalam penelitian, data dan informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijamin kerahasiaannya, dan hanya ditujukan untuk kepentingan ilmiah. Kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini adalah bantuan yang tak ternilai bagi peneliti.

Akhir kata, atas segala perhatian dan bantuannya peneliti ucapkan terima kasih.

Peneliti,

Rahman Bangsawan

22 2011 149

A. Identitas Responden

1. Nama Responden : .....
2. Posisi Jabatan : .....
3. Lama Bekerja sbg Auditor : .....
4. Jenis Kelamin* : ☐ Laki-laki
   ☐ Perempuan

4. Usia* : ☐ Dibawah 30 tahun
   ☐ 31 - 40 tahun
   ☐ Di atas 40 tahun

5. Pendidikan terakhir* : ☐ SMA
   ☐ Diploma (D3)
   ☐ Sarjana (S1)
   ☐ Pasca Sarjana (S2)

***Centang pada kolom yang di pilih**

Tanda Tangan,

(Nama Lengkap dan cap)

Cara pengisian kuisioner :

Mohon diisi dengan mencentang (√) pada kolom kuisioner "YA" atau "TIDAK" pada Tabel Kuisioner Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

1. Lingkungan Pengendalian

No.	Pertanyaan	Ya	tidak
1.	Apakah terdapat tindakan disiplin terhadap penyimpangan kebijakan atau prosedur aturan perilaku ?		
2.	Apakah terdapat pertangung jawaban dari pimpinan atas adanya intervensi atau pengabaian atau pengendalian intern ?		
3.	Apakah terdapat standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi ?		
4.	Apakah terdapat pelatihan dan pembimbingan bagi karyawan untuk meningkatkan kompetensi mereka ?		
5.	Apakah pimpinan menerapkan manajemen berbasis kinerja ?		
6.	Apakah pimpinan mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP, antara lain : • Pencatatan dan pelaporan keuangan • System manajemen informasi • Pengelolaan pegawai • Pengawasan, baik intern maupun ekstern		
7.	Apakah pimpinan memiliki sikap yang positif dan responsive terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan ?		
8.	Apakah pimpinan instansi memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab ?		
9.	Apakah pimpinan melakukan evaluasi dan penyesuaian secara periodic terhadap struktur organisasi ?		
10.	Apakah wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi ?		
11.	Apakah pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP ?		
12.	Apakah terdapat mekanisme untuk memberika keyakinan yang memdai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas		

	pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi ?		
13.	Apakah terdapat upaya memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan (good governance) tugas dan fungsi instansi ?		

II. Penilaian Resiko

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah pimpinan instansi menetapkan tujuan instansi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan ?		
2.	Apakah pimpinan telah menetapkan strategi operasional yang konsisten dengan rencana strategis dan rencana penilaian resiko ?		
3.	Apakah tujuan pada tingkatan kegiatan didukung sumber daya instansi yang cukup ?		
4.	Apakah seua tingkatan pimpinan instansi terlibat dalam proses penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komperhensif ?		
5.	Apakah resiko dari factor internal dan eksternal telah diidentifikasi dengan mekanisme yang memadai ?		
6.	Apakah penilaian atas factor lain yang dapat meningkatkan resiko telah dilaksanakan ?		
7.	Apakah pimpinan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima ?		

III. Kegiatan Pengendalian

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah pemahaman bersama atas visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi telah tercermin dalam revisi dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan pedoman panduan kerja lainnya dan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada seluruh pegawai ?		
2	Apakah instansi telah memiliki persyaratan jabatan dan menetapkan kinerja yang diharapkan untuk setiap posisi pimpinan ?		
3	Apakah pegawai telah diberikan orientasi, pelatihan, dan kelengkapan kerja untuk melaksanakan tugas dan		

	tanggungjawab, meningkatkan kinerja, meningkatkan kemampuan, serta memenuhi tuntunan kebutuhan organisasi yang beubah-ubah ?		
4	Apakah instansi telah secara berkala melaksanakan penilaian risiko secara periodic yang komperhensif ?		
5	Apakah pemilik sumber daya mengidentifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal ?		
6	Apakah instansi telah menetapkan pengendalian fisik dan pengendalian logic untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi ?		
7	Apakah seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan sudah diuji dan disetujui ?		
8	Apakah instansi telah menetapkan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunka (software libraries) termasuk pemberian label, pembatasan akses, dan penggunaan kepustakaan perangkat lunak yang terpisah ?		
9	Apakah akses keadan penggunaan perangkat lunak sistem dikendalikan dan dipantau ?		
10	Apakah instansi mengendaliakn dokumen sumber ?		
11	Apakah telah dilakukan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data ?		
12	Apakah data yang salah dengan segera dicatat, dilaporan, diinvestigasi, dan diperbaiki ?		
13	Apakah pimpnan instansi menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisai kepada pegawai ?		

IV. Informasi dan Komunikasi

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah informasi dari sumber internal dan eksternal didapat dan disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai bagian dari pelaporan instansi sehubungan dengan pencapaian kinerja operasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan ?		
2.	Apakah pimpinan instansi telah memastikan terjalinnya komunikasi internal yang efektif ?		
3.	Apakah pimpinan instansi telah memastikan bahwa sudah terjalin komunikasi eksternal yang efektif yang memiliki		

	dampak signifikan terhadap program, proyek, operasi, dan kegiatan lain termasuk penganggaran dan pendanaannya ?		
4.	Apakah pimpinan instansi telah menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting kepada pegawai dan lainnya ?		

V. Pemantauan Pengendalian Intern

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah dalam proses telah melaksanakan kegiatan rutin, pegawai instansi telah mendapatkan informasi berfungsinya pengendalian intern secara efektif ?		
2.	Apabila struktur organisasi dan supervise yang memadai telah membantu mengawasi fungsi dalam pengendalian intern ?		
3.	Apakah rapat dengan pegawai digunakan juga untuk meminta masukan tentang efektivitas pengendalian intern ?		
4.	Apakah pegawai secara berkala diminta untuk menyatakan secara tegas apakah mereka sudah mematuhi kode etik atau peraturan sejenis mengenai perilaku yang diharapkan ?		
5.	Apakah ruang lingkup dan frekuensi evaluasi pengendalian intern yang terpisah telah memadai bagi instansi ?		
6.	Apakah metodelogi evaluasi intern instansi telah logis dan memadai ?		
7.	Apakah kelemahan yang ditemukan selama evaluasi terpisah segera diselesaikan ?		

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
INSPEKTORAT KOTA
Jl. Kapuran No. 3 Kelurahan 22 Ilir Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352235 Fax (0711) 352235 Kode Pos 30131
E-mail: itkoplg@gmail.com Website : www.inspektorat.palembang.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor :800/ 114 /Itko/2015

Inspektur Kota Palembang menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: Rahman Bangsawan
Nim	: 222011149
Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

telah melaksanakan penelitian di Inspektorat Kota Palembang terhitung sejak tanggal 22 Desember 2014 s/d 22 Januari 2015 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan pada Kota Palembang."

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 05 Maret 2015
a.n Inspektur Kota Palembang
Sekretaris

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG INSPEKTORAT

KM. Ilyas Madani, ST.M.Si
Nip. 19720223 199803 1 003

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

.MA MAHASISWA	: **Rahman Bangsawan**	PEMBIMBING	
M	: **22 2011 149**	KETUA	: **Welly, S.E, M.Si**
:OGRAM STUDI	: **Akuntansi**	ANGGOTA	:
DUL SKRIPSI	: **EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG**		

).	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	26/2/2015	Bab I s/d III			Perbaiki lagi
2					
3	28/2/2015	Bab I s/d III			Perbaiki lagi
4					
5	2/3/2015	Bab I s/d III			Acc lanjut
6					Bab IV s/d V
7	3/3/2015	Bab IV s/d V			Perbaiki lagi +
8					Pembahasaan
9	6/3/2015	Bab IV s/d V			Perbaiki
0					
1	9/3/2015	Bab IV s/d V			Perbaiki
2					
3	10/3/2015	Bab IV s/d V			Acc.
4					
5	11/3/2015	Abstrak			Perbaiki
6	13/3/2015	Abstrak			Acc ~~[illegible]~~ kompehensif.

ATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan,

Program Studi

Roxalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI
INSTITUSI PERGURUAN TINGGI (B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1) (B)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1) (B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D) (B)

mpalembang.net/feump
mail : feumpig@gmail.com
mat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faksimile (0711) 518018

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/ Tanggal : Rabu/ 01 April 2015
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
Nama : Rahman Bangsawan
NIM : 222011149
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
Welly, S.E, M.Si	Pembimbing	7-4-2015	
Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Ketua Penguji	7-4-2015	
Hj. Ida Zuraida, S.E, Ak., M.Si	Penguji I	7-4-2015	
Welly, S.E, M.Si	Penguji II	7 APRIL 2015	

Palembang, April 2015
An. Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi

Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si
NIDN/NBM : 0228115802/1021961

Jadwal Penelitian

keterangan	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Survey Pendahuluan																				
Laporan Survey																				
Proposal																				
Seminar Proposal																				
Revisi Seminar																				
Pengambilan Data																				
Pengelolahan Data Analisis																				
Hasil Penelitian																				
Penggandaan Penelitian																				
Ujian Komperhensif																				
Perbaikan Skripsi																				

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

SERTIFIKAT

026/J-10/FEB-UMP/SHA/II/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

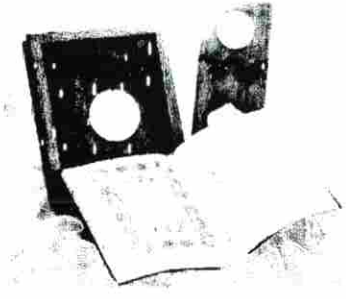

NAMA : RAHMAN BANGSAWAN
NIM : 222011149
JURUSAN : Akuntansi

Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 02 Maret 2015

an. Dekan
Wakil Dekan IV

Unggul dan Islami

Drs. Antoni, M.H.I.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
LABORATORIUM BAHASA
Jl. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Telp. (0711) 512637

TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name	:	Rahman Bangsawan
Place/Date of Birth	:	Palembang, January 8th, 1992
Test Times Taken	:	+1
Test Date	:	February 17th, 2015

Scaled Score

Listening Comprehension	:	46
Structure Grammar	:	39
Reading Comprehension	:	43
OVERALL SCORE	:	430

Palembang, March 5th, 2015

LAB. BAHASA

Rini Susanti, S.Pd.,M.A
NBM/NIDN. 1164932/0210098402

123 certificates

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

STATUS TERAKREDITASI

بسم الله الرحمن الرحيم

PIAGAM

No.259/H-4/PPKKN/UMP/IX/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa :

Nama	: Rahman Bangsawan
Nomor Pokok Mahasiswa	: 22 2011 149
Fakultas	: Ekonomi
Tempat Tgl. Lahir	: Palembang, 08-01-1992

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-7 yang dilaksanakan dari tanggal 16 Juli sampai dengan 2 September 2014 bertempat di:

Kelurahan/Desa	: Sidang Emas
Kecamatan	: Banyuasin III
Kota/Kabupaten	: Banyuasin
Dinyatakan	: LULUS

Palembang, 15 September 2014

Mengetahui
Rektor,

Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.

Ketua LPKKN,

Ir. Alhanannasir, M.Si.

BIODATA PENULIS

1. Data Pribadi
   a. Nama : Rahman Bangsawan
   b. NIM : 222011149
   c. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
   d. Jurusan : Akuntansi
   e. Tempat dan Tanggal lahir : Palembang, 08 januari 1992
   f. Alamat : Jl. Tegal Binangun Rt 06, RW 02 No 255 Plaju Palembang
   g. Nomor Telepon : 089627223228

2. Data Orang Tua
   a. Ayah : Amiruddin
   b. Ibu : Rohmania
   c. Alamat Orang Tua : Jl. Tegal Binangun Rt 06, RW 02, No 255 Plaju Palembang
   d. Pekerjaan:
      1) Ayah : Buruh
      2) Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan:

a. SD Negeri 257 Palembang Tahun 1998-2004
b. SMP Negeri 24 Palembang Tahun 2004-2007
c. SMA Fitra Abdi Palembang Tahun 2007-2010

8 Maret 2015

Rahman Bangsawan